

1. ISRAEL - FOREIGN RELATIONS
& ISRAEL - POLITICS AND GOVERNMENT.

C

KEBIJAKAN LUAR NEGERI ISRAEL TERHADAP PALESTINA ERA EHUD BARAK (1999-2001)

KIC

Fis H/27/01

Rah

k

SKRIPSI



Oleh :

FITRIYANI RAHMAWATI

NIM. 079614996

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GENAP 2000/2001**

KEBIJAKAN LUAR NEGERI ISRAEL TERHADAP PALESTINA ERA EHUD BARAK (1999-2001)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

Oleh :

FITRIYANI RAHMAWATI

NIM. 079614996

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GENAP 2000/2001**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan
pada tanggal 1 Juni 2001

Dosen Pembimbing:



Dra. Lilik Salamah, M.A.
NIP. 131569360

Mengetahui Ketua Program Studi:



Dra. Lilik Salamah, M.A.
NIP. 131569360

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Kebijakan Luar Negeri Israel Terhadap Palestina

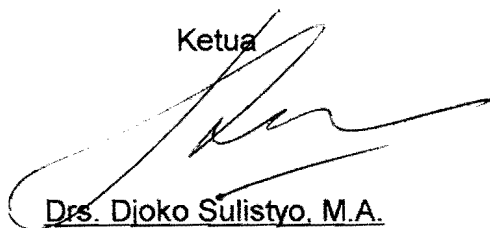
Era Ehud Barak (1999-2001)

telah dipertahankan di hadapan dosen penguji di

Surabaya, 18 Juni 2001


Susunan Panitia Penguji

Ketua

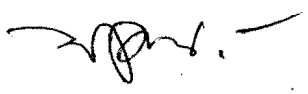


Drs. Djoko Sulistyono, M.A.
NIP.131453807

Anggota



Drs. I. Basis Susilo, M.A.
NIP.130937977



Drs. Wahyudi Purnomo, M.A.
NIP.131801402

ABSTRAK

Pada dasarnya, tidak ada perubahan kebijakan luar negeri Israel dalam menyikapi pembicaraan damai dengan Palestina baik dalam masa kepemimpinan Benyamin Netanyahu (1996-1999) maupun Ehud Barak (1999-2001). Kedua pemimpin tetap memfokuskan arah kebijakan luar negerinya pada keamanan nasional (*national security*) dengan batasan-batasan yang tak jauh berbeda: menolak terpecahnya Yerusalem, menolak pemulangan pengungsi Palestina, menentang keberadaan pasukan di barat sungai Jordan, dan mempertahankan pemukiman Yahudi. Namun Barak tidak mengambil langkah konfrontasi seperti pendahulunya. Ia cenderung memilih membuka kembali perundingan damai dengan mengupayakan pengimplementasian *Wye River Memorandum* (1998) yang dibekukan Netanyahu. Untuk mendukung keseriusannya dalam mengupayakan penyelesaian konflik, Barak menyatakan kesediaannya menerima pembentukan Negara Palestina di bawah kendali Pemerintah Otoritas Palestina pimpinan Yasser Arafat dan berjanji akan menghentikan pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah pendudukan Israel. Berangkat dari sinilah diindikasikan bahwa ada kepentingan spesifik yang ingin dicapai Barak melalui negosiasi, walaupun diprediksikan akan sulit dicapai kesepakatan yang komprehensif, terutama diakibatkan hambatan yang diciptakan batasan-batasan yang sejak awal sudah ditetapkan Israel.

Kata kunci: kebijakan luar negeri, kepentingan spesifik.